



Ilustrasi : google.com

Brexit, Integrasi Eropa, dan Regionalisme ASEAN

Drs. Muhadi Sugiono, M.A.
Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Kemenangan Brexit dalam referendum tanggal 23 Juni 2016 yang lalu menimbulkan spekulasi mengenai disintegrasi Uni Eropa. Banyak orang percaya bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan disusul oleh negara-negara anggota Uni Eropa yang lain. Integrasi regional akan berakhir dengan tragis. Seperti halnya gempa bumi yang meluluh-lantakkan apa yang ada di permukaan bumi, Brexit akan menghancurkan tatanan ekonomi dan politik Eropa yang semakin tersentralisir di Brussel dan mengembalikan kedulatan ke masing-masing negara. Tulisan ini tidak menyangkal bahwa keputusan rakyat Inggris untuk keluar dari Uni Eropa memiliki dampak yang besar bagi Eropa. Memahami Brexit sebagai awal dari disintegrasi Eropa adalah sebuah kesimpulan yang terlalu prematur dan berlebihan. Integrasi regional di Eropa yang telah mengubah interaksi antar negara serta geopolitik di Eropa menjauh dari karakter yang zero-sum terlalu berharga untuk dikorbankan. Tidak ada negara yang siap untuk melakukannya, termasuk Inggris. Bagi ASEAN, Brexit memberikan pelajaran berharga bagi regionalisme yang semakin berkembang di Asia Tenggara.



PENDAHULUAN

Brexit, keluar dari Uni Eropa, adalah keputusan yang diambil oleh rakyat Inggris melalui referendum tanggal 23 Juni 2016. Banyak pengamat, media maupun para politisi melihat keputusan tersebut sebagai sebuah gempa bumi yang dahsyat dan menimbulkan reaksi berantai menuju ke disintegrasi Eropa (BBC 2016; The Guardian 2016). Keputusan yang tak terbayangkan sebelumnya itu, sekarang menjadi realitas yang harus dihadapi oleh Eropa. Sekalipun masih harus melalui proses negosiasi yang panjang, rumit dan mungkin juga alot sebelum akhirnya Inggris secara resmi keluar dari Uni Eropa, hasil referendum secara jelas mengisyaratkan bahwa Eropa tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dan, dengan kapasitas Uni Eropa sebagai kekuatan global, tidak dapat dipungkiri 'gempa bumi' *Brexit* tidak hanya berdampak bagi Eropa, melainkan juga global. Tulisan ini berargumen bahwa *Brexit* hanya akan mengubah regional *governance* di Eropa, tetapi tidak mengubah geopolitik secara signifikan.

Tulisan ini akan membahas makna *Brexit* dan relevansinya bagi regionalisme di Asia Tenggara, yang akan diawali dengan melihat konteks kemenangan *Brexit*.

PEMBAHASAN

Brexit dalam Konteks

Bagi banyak orang, hasil referendum yang memenangkan kelompok yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa sebenarnya tidak sepenuhnya mengejutkan. *Brexit* pada dasarnya mencerminkan fenomena menguatnya pandangan yang skeptis terhadap Uni Eropa. Survei yang dilakukan oleh sebuah organisasi tangki pemikiran (*think tank*) Amerika, PEW Research Center, baru-baru ini menunjukkan peningkatan sentimen anti Uni Eropa (*Euroscepticism*) di seluruh Eropa,

meskipun 51% dari responden yang disurvei di sepuluh negara anggota Uni Eropa masih sangat mendukung Uni Eropa (Stokes, 2016, h. 2). Sentimen anti Uni Eropa ini terutama didukung oleh kelompok-kelompok kanan ekstrem yang semakin meningkat dan semakin populer di banyak negara anggota Uni Eropa akibat melemahnya ekonomi serta krisis migrasi. Dilihat dengan cara ini, *Brexit* bukan merupakan kasus yang eksklusif. Bisa jadi *Brexit* merupakan awal dari serangkaian eksodus dari Uni Eropa. Kemenangan *Brexit* segera mendorong para politisi sayap kanan yang populis untuk menyerukan referendum di negara-negara mereka (Lyons and Darrochs, 2016; Follain, 2016).

Sebenarnya, hasil survei PEW Research Center tidak menempatkan Inggris dalam urutan teratas sebagai negara dalam prosentase penduduk yang menentang Uni Eropa. Posisi Inggris berada di bawah Yunani, Perancis dan Spanyol yang masing-masing mencapai 48%, 71%, 60% dan 49%. Tetapi, terdapat beberapa faktor yang mendorong atau bahkan menjelaskan kemenangan *Brexit* dalam referendum.

Pertama, karakter keanggotaan Inggris di Uni Eropa yang sangat unik. Inggris tidak pernah sepenuhnya tergabung dengan Uni Eropa. Masuknya Inggris ke Uni Eropa lebih didasarkan pada pertimbangan pragmatis dan kalkulasi untung rugi secara ekonomi dibandingkan dengan pertimbangan identitas maupun keterkaitan emosional. *The Economist* menyebut hubungan Inggris dengan Uni Eropa sebagai hubungan yang 'transaksional' (2016). Pada dasarnya Inggris tidak pernah tertarik dengan daratan Eropa dan lebih cenderung untuk memelihara hubungan dekatnya dengan Amerika dan negara-negara persemakmuran. Inggris baru berminat untuk bergabung dengan Uni Eropa setelah Uni Eropa menunjukkan perkembangan ekonomi yang semakin kuat.

Kedua, keinginan dan keberhasilan Inggris untuk menuntut keanggotaannya yang



istimewa di Uni Eropa di atas sangat terkait dengan persepsi dan realitas tentang Inggris yang berbeda dengan negara-negara Eropa daratan. Secara geografis, Inggris terpisah dari daratan benua Eropa dan menghasilkan tradisi yang cenderung berbeda dengan negara-negara Eropa daratan. Dalam sejarahnya, Inggris pernah menjadi kekuatan global, dengan pengaruh yang sangat luas di dunia. Pada saat negara-negara Eropa daratan terjebak dalam berbagai konflik dan pertikaian internal di Eropa, Inggris justru memiliki keleluasaan untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya ke luar Eropa. Setelah kejayaannya berakhir, Inggris tetap menikmati keistimewaannya melalui hubungan dekatnya dengan Amerika, dengan negara-negara persemakmuran dan statusnya sebagai salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa. Dengan status Inggris yang istimewa tersebut, hubungan Inggris dengan Uni Eropa menyerupai hubungan perkawinan yang tidak harmonis dan penuh dengan gejolak (Henley, 2016). Sementara, pada tahun 1950-an Inggris menolak ajakan untuk bergabung ke dalam Masyarakat Ekonomi Eropa, pada tahun 1960-an keinginan Inggris untuk menjadi anggota Uni Eropa kandas karena penolakan Perancis. Presiden Charles de Gaulle tidak menginginkan Inggris menjadi anggota Uni Eropa karena dianggap memiliki tradisi yang berbeda dengan Eropa daratan dan keahawatirannya akan kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh kedekatan Inggris dengan Amerika. Memang, seperti terlihat, dalam sejarah keanggotaannya berbagai pemerintahan di Inggris secara bergantian menjadikan keluarnya Inggris dari Uni Eropa sebagai salah satu pilihan kebijakan terutama pada saat mereka berhadapan dengan persoalan di dalam negeri Inggris. Keinginan untuk keluar dari Uni Eropa bahkan sudah muncul hanya dalam kurun waktu dua tahun setelah Inggris bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1973 (The Telegraph, 2016).

Dengan latar belakang di atas, bagi para pendukung Brexit, keanggotaan Inggris di Uni Eropa harus semata-mata didasarkan pada prinsip utilitarian. Uni Eropa adalah instrumen kepentingan nasional Inggris dan keanggotaan Inggris di Uni Eropa adalah sebuah cara untuk mencapai kepentingan tersebut. Dengan kata lain, Inggris bergabung dengan Uni Eropa karena pasar tunggal yang ditawarkan oleh Uni Eropa, bukan karena keinginannya untuk membangun atau mewujudkan impian bersama negara-negara anggota Uni Eropa (*European dream*). Oleh karenanya, Inggris harus keluar dari Uni Eropa jika dalam kalkulasi rasional (untung rugi) terhadap harga yang dibayar oleh Inggris untuk memperoleh akses ke pasar tunggal Eropa ternyata lebih besar daripada keuntungan yang diterimanya. Dan, para pendukung Brexit sangat yakin bahwa Inggris membayar harga yang sangat mahal dengan kedaulatannya. Sebagai anggota Uni Eropa, Inggris bukan hanya harus membebaskan pergerakan barang, melainkan juga tenaga kerja. Akibatnya, Inggris dibanjiri pekerja dari negara-negara anggota Uni Eropa yang lebih miskin setelah negara-negara tersebut bergabung dengan Uni Eropa (Shuster, 2016, h. 14; Travis, 2016). Tingginya tingkat migrasi ke Inggris ini memicu kekhawatiran akan hilangnya pekerjaan, pendapatan maupun taraf hidup yang baik yang selama ini dinikmati oleh rakyat Inggris. Brexit akan mengembalikan kekuasaan Inggris untuk mengendalikan aliran pendatang dan mencegah gelombang masuknya tenaga kerja dari negara-negara anggota Uni Eropa yang lain. Apa yang bagi pendiri Uni Eropa sebagai sebuah tujuan, bagi pendukung Brexit adalah ancaman.

Berbagai krisis yang melanda Eropa beberapa tahun terakhir ini seperti krisis di Yunani, krisis migrasi serta konflik di perbatasan-perbatasan Eropa memang tidak dipungkiri telah memperkuat daya tarik dan pengaruh Euroskeptisme. Tetapi menempatkan Uni Eropa sebagai sumber



dan kambing hitam dari semua persoalan tersebut, mungkin merupakan kesimpulan yang sangat menyesatkan. Pertama, berbagai persoalan tersebut akan muncul dengan ataupun tanpa eksistensi Uni Eropa. Karakter hubungan internasional yang semakin saling tergantung, tidak memungkinkan Eropa untuk kebal dari pengaruh global. Kedua, argumen yang dibangun oleh pendukung keluarnya Inggris dari Uni Eropa cenderung sangat ideologis dan tidak didukung oleh data yang memadai. Keyakinan para pendukung Brexit bahwa meningkatnya pekerja dari negara-negara anggota Uni Eropa yang lebih miskin merupakan ancaman bagi para pekerja dan kesejahteraan rakyat Inggris sebenarnya tidak cukup berdasar. Sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di London School of Economics and Political Science baru-baru ini, misalnya, menyimpulkan dengan tegas bahwa tidak ada pengaruh negatif (atau positif) yang signifikan dari meningkatnya migrasi di dalam Uni Eropa dengan lapangan kerja, gaji dan kesenjangan pelayanan publik warga yang dilahirkan di Inggris (Wadsworth, Dhingra, Ottaviano & Reenen, 2016, h. 16).

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa memiliki dua kemungkinan yang sama kuatnya, yakni menguntungkan ataupun merugikan baik Inggris, Uni Eropa maupun kedua-duanya. Oleh karenanya, kemenangan Brexit tidak bisa dilihat secara eksklusif atau terjadi di ruang hampa. Yang tidak kalah penting dari kemenangan Brexit adalah bagaimana memaknai kemenangan Brexit. Bagian berikut dari tulisan ini akan membahas makna kemenangan Brexit dan implikasinya bagi Uni Eropa serta Eropa pada umumnya.

Brexit dan Disintegrasi Uni Eropa?

Kemenangan pendukung Brexit melahirkan spekulasi mengenai disintegrasi Uni Eropa. Sementara selama ini Uni Eropa hanya dilihat dalam kaitannya

dengan integrasi Eropa, Brexit dianggap merupakan sebuah perkembangan yang bertolak belakang, yakni disintegrasi Eropa. Pandangan ini terutama ditampilkan oleh mereka yang menentang Uni Eropa (*Euroscepticists*) baik di dalam maupun di luar Uni Eropa. Di dalam Uni Eropa pandangan ini tercermin dalam pandangan-pandangan pendukung skeptisisme terhadap Uni Eropa. Brexit, bagi mereka, adalah contoh konkret yang akan diikuti oleh proses yang sama di negara-negara lain. Para pemimpin sayap kanan segera merespon kemenangan Brexit dengan tuntutan referendum di negara mereka masing-masing (Lyons and Darroch, 2016). Di luar Uni Eropa, pandangan bahwa Brexit merupakan awal dari disintegrasi Uni Eropa diwakili misalnya oleh media media di Rusia, Pravda. Sehari setelah referendum di Inggris, Pravda menampilkan berita yang menggambarkan kemenangan Brexit sebagai akhir dari hubungan yang tidak sehat antara Uni Eropa dengan anggotanya (Pravda, 2016).

Pandangan tentang disintegrasi Uni Eropa ini sangat bisa dipahami jika dilihat dari perspektif rasional, baik yang berbasis kepentingan maupun kekuasaan. Yang pertama, yang melihat Uni Eropa sebagai semata-mata produk ataupun refleksi kepentingan negara-negara anggotanya, menganggap bahwa menjadi anggota Uni Eropa tidak lagi memberikan imbalan yang memadai dibandingkan dengan biaya ataupun beban yang harus ditanggung oleh suatu negara. Brexit dan para pendukung *Euroscepticism* cenderung mendasarkan argumen mereka pada aspek kepentingan ini. Sumber pandangan tentang disintegrasi yang kedua adalah politik kekuasaan (*power politics*). Dalam pandangan ini, Uni Eropa digambarkan sebagai sebuah bentuk dominasi terhadap negara-negara anggotanya. Keluar dari Uni Eropa, oleh karenanya, dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk keluar dari hubungan kekuasaan dan dominasi Uni Eropa. Yang kedua ini



sangat tercermin dalam pandangan Rusia dan, sampai tingkat tertentu, para pendukung Euroskeptisisme, terhadap Brexit.

Sekalipun disatukan oleh kesimpulan bahwa Uni Eropa sedang mengalami proses disintegrasi, pandangan mereka terhadap implikasi dari disintegrasi Uni Eropa mungkin sangat berbeda. Pandangan pertama tidak secara otomatis mengimplikasikan hubungan Uni Eropa dengan negara-negara yang keluar dari Uni Eropa melalui kacamata zero-sum, yakni hubungan permusuhan, karena baik Inggris maupun Uni Eropa berdasarkan kalkulasi kepentingan masih membutuhkan satu sama lain. Sebaliknya, pandangan kedua cenderung melihat keluarnya Inggris sebagai sebuah bentuk permusuhan terhadap Uni Eropa. Mengutip para pemimpin Brexit, Pravda menggambarkan keluarnya Inggris sebagai upaya untuk menghentikan penindasan para teknokrat di Brussels dan untuk menghancurkan kekaisaran setan Uni Eropa dan membebaskan 27 negara dari penindasan para Eurokrat' (Pravda, 2016).

Tetapi, mengkaitkan Brexit dengan disintegrasi Uni Eropa sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Pandangan-pandangan rasional tentang disintegrasi Uni Eropa tersebut tidak cenderung mengabaikan hakekat perkembangan Uni Eropa sebagai sebuah entitas serta makna Uni Eropa bagi negara-negara anggotanya yang tidak bisa direduksi melalui perspektif rasional semata.

Berbeda dengan yang digambarkan oleh para penentang Uni Eropa baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar, hubungan antara Uni Eropa dengan negara-negara anggotanya jauh dari karakter imperialistik, dominatif ataupun eksploitatif. Kebijakan yang dikenal dengan perluasan keanggotaan (*enlargement*), misalnya, pada dasarnya lebih merupakan kebijakan Uni Eropa untuk membuka diri bagi negara-negara di luar Uni Eropa daripada kebijakan ekspansionis. Disamping itu, sekalipun Uni

Eropa menerapkan standard yang cukup tinggi bagi keanggotaan sebuah negara, dan negara-negara yang akan bergabung dengan Uni Eropa harus melakukan penyesuaian-penyesuaian baik politik maupun ekonomi mereka, tidak berarti bahwa keanggotaan sebuah negara di Uni Eropa merupakan sebuah bentuk pemaksaan. Bahkan sebaliknya. Banyak negara sangat antusias untuk bergabung dengan Uni Eropa, termasuk negara-negara yang sebelumnya adalah negara-negara anggota Blok Timur, di bawah kendali Uni Soviet.

Uni Eropa memiliki daya tarik yang besar bagi banyak negara untuk bergabung. Tetapi daya tarik Uni Eropa tidak dapat dilihat semata-mata dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi, politik, ataupun strategis jangka pendek negara-negara yang ingin bergabung. Bagi negara-negara Eropa Timur, misalnya, Uni Eropa menggambarkan kepercayaan diri dan mercusuar peradaban serta kemakmuran. Uni Eropa berkembang pesat pada saat dunia pada umumnya menghadapi kekacauan dan kemunduran (van Ham, 2002, h. 4-5). Dengan kata lain, Uni Eropa adalah sebuah citra. Bagi negara-negara tersebut, menjadi anggota Uni Eropa akan mengubah citra mereka dari negara-negara yang sering digambarkan dengan kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakpastian, menjadi negara-negara dengan kualitas Uni Eropa. Menjadi anggota Uni Eropa bagi negara-negara bekas Blok Timur adalah citra, yakni sebagai bagian dari 'klub' yang sangat bergengsi. Hanya dengan citra positif ini negara-negara tersebut bisa berbicara tentang keuntungan materiil maupun strategis dan oleh karenanya negara-negara dengan bersedia melakukan transformasi sosial, politik dan ekonomi untuk memenuhi kualifikasi sebagai anggota Uni Eropa.

Uni Eropa adalah cermin perubahan yang sangat fundamental dalam geopolitik Eropa, dari kawasan yang sarat dengan perang dan pertumpahan darah menjadi



sebuah kawasan yang ditandai dengan perdamaian dan kemakmuran. Dalam sejarahnya, hingga berakhirnya Perang Dunia II, hubungan internasional di Eropa sangat diwarnai oleh politik kekuasaan (*power politics*). Perimbangan kekuatan menjadi mekanisme yang dominan. Bekerja sebagaimana hukum gravitasi, perimbangan kekuatan menjelaskan semua dinamika dalam hubungan internasional di Eropa. Perimbangan kekuatan bukan hanya menjelaskan mengapa perang terjadi, tetapi juga mengapa perdamaian bisa muncul di Eropa (Taylor 1954, h. xix). Uni Eropa mengubah dominasi politik kekuasaan ini dengan menekankan pada aturan dan kelembagaan serta prinsip multilateralisme (Monnet, 2003, h. 23). Perubahan ini tercermin dengan jelas dalam semangat yang mendasari dibentuknya European Coal and Steel Community (ECSC) sebagai cikal bakal Uni Eropa. Saat ini, Uni Eropa telah berkembang jauh melampaui apa yang dibayangkan oleh para pendirinya. Dari sebuah institusi resolusi konflik (menjauh dari mekanisme perimbangan kekuatan) di awal perkembangannya, Uni Eropa saat ini adalah sebuah komunitas dan sebuah *governance*. Perubahan ini bukan semata-mata mengubah aspek material ataupun institusional dalam hubungan antar negara di Eropa, tetapi juga aspek non material, yakni, cara berpikir elit dan rakyat di Eropa. Uni Eropa menjadikan perang tidak lagi menjadi kosakata dalam hubungan antar negara-negara anggotanya. Dengan kata lain, berkembangnya Uni Eropa menjadikan Eropa Barat sebagai sebuah 'komunitas keamanan' (Adler and Barnett, 1998; Waever, 2000).

Tetapi, Uni Eropa bukan semata-mata produk dari perubahan yang terjadi di Eropa. Uni Eropa juga merupakan agen dalam transformasi yang berlangsung di Eropa tersebut. Transformasi Eropa tidak terjadi sebagai sebuah kebetulan sejarah. Transformasi Eropa terjadi karena

kemauan dan upaya serius negara-negara anggota Uni Eropa secara kolektif untuk merealisasikan perdamaian di Eropa sebagai tujuan bersama. Integrasi regional menjadi sarana untuk merealisasikan tujuan bersama ini. Dengan kata lain, integrasi regional adalah sebuah proyek perdamaian negara-negara anggota Uni Eropa (Birchfield, Krige and Young, 2017). Nobel perdamaian yang diberikan kepada Uni Eropa mencerminkan secara jelas pengakuan terhadap peran agensi Uni Eropa dalam transformasi di Eropa. Dalam pengumumannya mengenai penganugerahan Nobel Perdamaian kepada Uni Eropa, Panitia Nobel Norwegia, mencantumkan secara tegas peran Uni Eropa, '*[t]he union and its forerunners have for over six decades contributed to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe*' (The Norwegian Nobel Prize, 2012).

Perkembangan, hakekat keberadaan serta makna Uni Eropa bagi negara-negara anggotanya di atas secara jelas menunjukkan bahwa Uni Eropa bukan semata-mata organisasi ataupun institusi, melainkan juga mindset dan identitas yang mendasari hubungan internasional di Eropa saat ini. Dilihat dengan cara ini, sulit membayangkan Brexit akan secara drastis mengubah geopolitik di Eropa. Tentu saja, terdapat implikasi praktis dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Dan, sekalipun Inggris berada di luar Uni Eropa, tidak ada alasan bagi Inggris untuk menolak semangat dan tujuan bersama yang mendasari terbentuknya Uni Eropa, yakni untuk mencapai perdamaian di Eropa. Dengan alasan yang sama, spekulasi mengenai disintegrasi Uni Eropa menyusul keluarnya Brexit dari Uni Eropa juga tidak cukup berdasar.

Eropa Pasca Brexit dan Asia Tenggara

Brexit, seperti diuraikan sebelumnya, tidak mengubah secara drastis geopolitik di Eropa dan oleh karenanya tidak ada



pengaruh langsung yang signifikan dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa bagi Asia Tenggara. Dampak Brexit akan terasa di Asia Tenggara secara tidak langsung, melalui dua hal.

Pertama, Brexit akan memperkuat kecenderungan yang terjadi dalam hubungan antara Uni Eropa dan negara-negara Asia Tenggara. Brexit terjadi dalam konteks buntutnya perundingan tentang Perjanjian Perdagangan Bebas antara Uni Eropa dan ASEAN. Kecil kemungkinan Uni Eropa akan berminat untuk melanjutkan kembali perundingan yang macet sejak tahun 2009 tersebut. Pertama karena Uni Eropa jelas akan disibukkan dengan pembenahan internal pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan, kedua, pada saat yang sama, Uni Eropa sudah melakukan negosiasi dengan negara-negara anggota ASEAN secara individual. Dalam artian ini, kecenderungan ke arah bilateralisme dalam hubungan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Uni Eropa akan semakin kuat pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Kecenderungan ke arah bilateralisme juga akan menguat seiring dengan menguatnya keinginan Inggris untuk memperkuat hubungan ekonominya dengan negara-negara anggota ASEAN. Sejauh mana dampak dari kecenderungan ke arah bilateralisme ini berpengaruh terhadap regionalisme di Asia Tenggara, tentu bisa diperdebatkan.

Dampak tidak langsung yang lain dari Brexit bagi Asia Tenggara adalah terkait dengan arah dan tingkat integrasi regional. Sekalipun negara-negara anggota ASEAN tidak pernah menjadikan Uni Eropa sebagai model integrasi regional di Asia Tenggara, perkembangan regionalisme di Asia Tenggara menggambarkan semangat yang sama dengan semangat integrasi regional di Eropa. Terbentuknya ASEAN *Community* mengingatkan kita pada semangat pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa dengan slogannya *'ever closer union'* (European Union, 2017). Dalam artian ini,

Brexit memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam kaitannya dengan semangat untuk melakukan integrasi lebih intensif di Asia Tenggara. Di Eropa, semangat *'ever closer union'* telah mendorong munculnya resistensi dari para *Euroscpticist*, dan mencapai puncaknya dengan kemenangan Brexit dalam referendum di Inggris (The Economist, 2016a).

Integrasi regional di Asia Tenggara jelas sangat berbeda dengan integrasi regional di Eropa. Berbeda dengan Uni Eropa, ASEAN tidak bekerja dengan logika penyerahan kedaulatan ke lembaga supranasional. ASEAN, sebaliknya, justru bekerja dengan logika yang memperkuat kedaulatan melalui kerjasama regional. Dalam artian ini, kekhawatiran akan munculnya fenomena Brusselisasi di Eropa, yakni menguatnya kekuasaan Uni Eropa atas negara-negara anggotanya, tidak mungkin terjadi, setidaknya dalam waktu dekat. Tetapi, Uni Eropa dan ASEAN tidak sepenuhnya berbeda sejauh proses integrasi regional dilakukan lebih melalui proses yang *top down* daripada *bottom up*. Kemenangan Brexit juga sering diartikan sebagai perlawanan rakyat terhadap elit di Eropa (Jasper, 2016, h. 18). Di ASEAN, kesenjangan antara elit dan rakyat juga sangat nampak. ASEAN *Way*, misalnya, seringkali digambarkan sebagai bagian dari karakter elitis ASEAN dan semua proses yang berlangsung di ASEAN (Gomez and Ramcharan, 2014). Sekalipun mungkin tidak memiliki implikasi yang drastis sebagaimana yang ditunjukkan oleh Inggris melalui Brexit, kesenjangan antara elit dan rakyat di Asia Tenggara akan berpengaruh terhadap keberhasilan ASEAN mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui ASEAN *Community*.

PENUTUP

Brexit cenderung diasosiasikan dengan perubahan drastis di Eropa, karena asumsi bahwa Brexit adalah awal dari disintegrasi



Uni Eropa. Uni Eropa dan integrasi Eropa tidak lagi bisa dianggap sebagai dua hal yang sangat terkait dengan kemenangan Brexit. Tetapi, pandangan bahwa Brexit menandai awal disintegrasi Uni Eropa gagal memahami hakekat Uni Eropa dan makna Uni Eropa bagi negara-negara anggotanya. Uni Eropa bukan sekedar organisasi ataupun institusi yang menjadi instrumen negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendeknya (terutama, kepentingan material). Uni Eropa adalah identitas dan kerangka berpikir yang sangat mempengaruhi negara-negara anggotanya dalam hubungan internal maupun eksternal mereka. Dalam artian ini, pandangan bahwa Brexit akan diikuti oleh negara-negara lain atau Brexit sebagai awal disintegrasi Uni Eropa tidak cukup berdasar.

Brexit tidak akan mengubah geopolitik di Eropa secara signifikan dan oleh karenanya, pengaruh Brexit bagi Asia Tenggara juga tidak akan terlalu besar, meskipun bukan tidak ada. Bagi negara-negara di Asia Tenggara, Brexit memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam kaitannya dengan integrasi regional. Brexit menunjukkan bahwa integrasi regional yang sangat, atau dipandang sangat, elitis cenderung akan menimbulkan perlawanan. Tudingan bahwa ASEAN adalah organisasi yang sangat elitis, oleh karenanya perlu memperoleh perhatian serius. Setidaknya, ASEAN harus secara serius merealisasikan semangatnya untuk menjadikan ASEAN berorientasi kepada rakyat. Hanya dengan cara ini, integrasi regional bukan hanya dapat mencapai tujuan-tujuannya, tetapi juga dapat langgeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, E., and Barnett, M.N. eds. (1998) *Security Communities*. Cambridge: Cambridge University Press.
- BBC (2016) 'Brexit: What the world's papers say,' 24 June, online <http://www.bbc.com/news/world-europe-36619254>, diakses 4 Maret 2017.
- Birchfield, V., Krige, J., and Young, A. (2017) 'European integration as a peace project' *The British Journal of Politics and International Relations*, 19/1, h. 3-12.
- Dinan, D. (2010). *Ever closer union: an introduction to European integration*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- The Economist, 2016, 'The roots of Euroscepticism: Why Britons are warier than other Europeans of the EU,' 12 March, online <http://www.economist.com/news/britain/21694557-why-britons-are-warier-other-europeans-eu-roots-euroscepticism>, diakses 5 Maret 2017.
- The Economist, 2016a, 'Ever farther union,' 27 February, online <http://www.economist.com/news/europe/21693620-principle-ever-closer-union-died-long-britain-demanded-exemption-ever-farther>, diakses 25 Maret 2017.
- European Commission (t.t.) *Treaty of Rome 1957*, online http://ec.europa.eu/archives/emu_history/documents/treaties/rometreaty2.pdf, diakses 28 Februari 2017.
- European Commission (t.t.a) 'From 6 to 28 Members - European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations' online https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/from-6-to-28-members_en, diakses 17 Maret 2017.
- European Union (2017) *Treaty of Rome (EEC)*. Online <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Axy0023>, diakses 2 April 2017
- Follain, J. (2016) 'After Brexit and Trump, Populists Target Next Dominoes in Europe,' *Bloomberg*, 10 November,



- online <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-09/after-brex-it-and-trump-populists-target-next-dominoes-in-europe>, diakses 4 Maret 2017.
- The Guardian (2016) 'Frexit, Nexit or Oexit? Who will be next to leave the EU,' 27 June, online <https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/27/frexit-nexit-or-oexit-who-will-be-next-to-leave-the-eu>, diakses 4 Maret 2017.
- Gomez, J. and Ramcharan, R. (2014) 'Evaluating Competing "Democratic" Discourses: The Impact on Human Rights Protection in Southeast Asia' dalam *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33/3, h. 49–77.
- van Ham, P. 2001, 'The Rise of the Brand State: The Postmodern Politics of Image and Reputation,' *Foreign Affairs* 80/5.
- Hensley, J. (2016) 'Britain and the EU: the story of a very rocky marriage,' *The Guardian*, 23 June, online <https://www.theguardian.com/world/2016/jun/23/referendum-britain-and-the-eu-the-story-of-a-very-rocky-marriage>, diakses 7 Maret 2017.
- Jasper, W. (2016) 'Brexit: Rejecting Globalism' *The New American*, 8 Agustus.
- Lyons, K. and Darroch, G. (2016) 'Frexit, Nexit or Oexit? Who will be next to leave the EU' *The Guardian*, 27 June 2016. <https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/27/frexit-nexit-or-oexit-who-will-be-next-to-leave-the-eu>. 14 Mar. 2017.
- Monnet, J. (2003) 'A Ferment of Change' dalam Nelsen, B. F. and Stubb, A. (eds.) *The European Union. Readings on Theory and Practice of European Integration*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.
- The Norwegian Nobel Prize Committee (2012) *The Nobel Prize for 2012*. Online http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/press.html, diakses 31 Maret 2017.
- Pravda (2016) 'Brexit: The Collapse of Europe,' 24 June. <http://www.pravdareport.com/world/europe/24-06-2016/134816-brex-it-0/>, 15 Mar 2017.
- Shuster, S. (2016). 'Special Report - Europe's Crisis of Faith: The Brief' *Time*, Juli, h. 11-18.
- Stokes, B. (2016) *Euroskepticism Beyond Brexit: Significant opposition in key European countries to an ever closer*, PEW Research Center, 7 June.
- Taylor, A. J. P. (1954) *The Struggle for the Mastery of Europe, 1848-1918*. Oxford: Clarendon, 1954.
- The Telegraph, 2016, 'Britain's 40 year relationship with the EU,' 16 June, online <http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/16/britains-40-year-relationship-with-the-eu/>, diakses 7 Maret 2017.
- Travis, Alan (2016). 'Immigration to UK hit record levels prior to Brexit vote, data shows' *The Guardian*, 1 December, online <https://www.theguardian.com/uk-news/2016/dec/01/immigration-to-uk-hit-record-levels-in-run-up-to-brex-it-vote-latest-figures-show>, diakses 7 Maret 2017
- Wadsworth, J., Dhingra, S., Ottaviano G., and Reenen, J. (2016) *Brexit and the Impact of Immigration on the UK*, CEP Brexit Analysis No. 5. London School of Economics and Political Science
- Waever, O. (2000) 'The EU as a Security Actor: Reflections from a Pessimistic Constructivist on Post-Sovereign Security Orders' dalam Kelstrup, M. and Williams, M.C. *International Relations Theory and the Politics of European Integration: Power, Security, and Community*. London: Routledge.